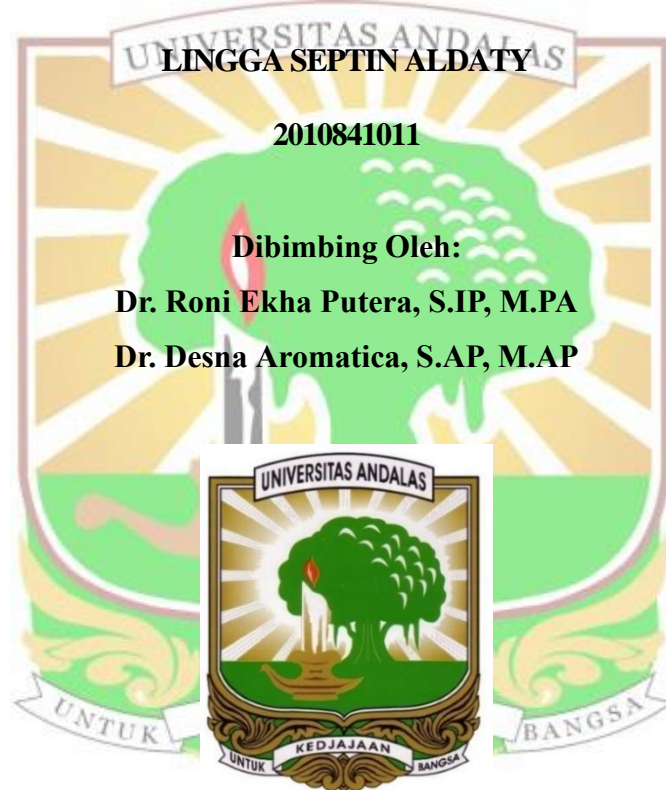


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS
HAK ASASI MANUSIA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

ABSTRAK

Lingga Septin Aldaty, 2010841011, Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2024. Dibimbing oleh: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA dan Dr. Desna Aromatica, S.AP., M.AP. Skripsi ini terdiri dari 148 halaman dengan referensi 6 buku teori, 4 buku metode, 4 artikel jurnal, 4 Skripsi, 10 dokumen dan peraturan perundang-undangan dan 3 website internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi dari Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi kewajiban unit kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan triangulasi sumber data. Analisis hasil temuan penelitian dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edwards III, dengan empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan variabel teori implementasi oleh Edwards III, ditemukan bahwa Implementasi dari Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan semestinya. Pertama pada variabel komunikasi, informasi kebijakan sudah disampaikan dengan kepada pelaksana namun belum secara luas kepada pengakses layanan di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Kebijakan P2HAM telah mengalami dua kali pergantian namun Kanwil tetap konsisten melaksanakan aturan yang berlaku tanpa adanya pertentangan. Kedua variabel sumber daya, dari empat ketersediaan sumber daya yang diperlukan tiga diantaranya yaitu sumber daya manusia, informasi dan kewenangan telah tersedia dengan baik. Namun indikator fasilitas masih terkendala anggaran biaya. Selanjutnya pengangkatan birokrat dalam variabel disposisi telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam tim. Sedangkan insentif, terdapat pemberian penghargaan kepada unit kerja namun tidak cukup mempengaruhi disposisi pelaksana untuk lebih mendukung pelaksanaan kebijakan P2HAM. Variabel terakhir yaitu struktur birokrasi, tidak tersedianya SOP pelaksanaan P2HAM dan adanya pembagian kerja yang cukup menghambat koordinasi pelaksanaan kebijakan P2HAM.

Kata kunci: Implementasi, Pelayanan publik, P2HAM, Kantor Wilayah

ABSTRACT

Lingga Septin Aldaty, 2010841011, Implementation of Human Rights-Based Public Service Policy at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, West Sumatera, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, 2024. Supervised by: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA and Dr. Desna Aromatica , S.AP., M.AP. This thesis consists of 148 pages with references to 6 theory books, 4 method books, 4 journal articles, 4 theses, 10 documents and regulations and 3 internet websites.

The purpose of this study is to describe how human rights-based public service policies are implemented at the Ministry of Law and Human Rights' Regional Office in West Sumatera. This study is motivated by the Ministry of Law and Human Rights work unit's obligations to implement Human Rights Based Public Services (P2HAM).

This study employs a qualitative methodology with a descriptive research design. The data collection process involved employing interview techniques, conducting observations, and documenting the findings. The process of selecting research informants employed a purposive sample strategy, which involved the use of multiple data sources to ensure accuracy and reliability. The research data were analyzed using Edwards III's policy implementation theory, which considered four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

According to the findings of Edwards III's implementation theory research, the West Sumatera Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights is successfully implementing Human Rights-Based Public Service Policies. Although there are several indicators that are still not working well. Firstly, in the communication variable, policy information has been conveyed to implementers but not yet widely to service accessors at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, West Sumatera. The P2HAM policy has undergone two changes, but the Regional Office remains consistent in implementing the applicable rules without any conflict. The two resource variables, of the four required resource availability, three of them, namely human resources, information and authority, are well available. However, facility indicators are still constrained by budget costs. Furthermore, bureaucrats' disclosures in the disposition variable are in accordance with the competencies required at that time. Meanwhile, incentives provide awards to work units but are not enough to influence the disposition of implementers to further support the implementation of P2HAM policies. The final variable is the bureaucratic structure, the unavailability of SOPs for implementing P2HAM and the division of work which is quite hampering the coordination of implementing P2HAM policies.

Keywords: Implementation, Public Services, Human Rights, P2HAM, Regional Offices